

ABSTRAK

ISIS merupakan kelompok teroris yang mengancam perdamaian dunia. Agustus 2014, ISIS menyerang etnis Yazidi yang beragama non-islam di Sinjar, Irak. ISIS melakukan penyiksaan, pembunuhan, kekerasan seksual terhadap etnis Yazidi di Irak dan Suriah. Berdasarkan uraian tersebut dilakukan analisis tindakan ISIS terhadap etnis Yazidi menggunakan parameter unsur kejahatan genosida serta analisis mekanisme penegakan hukum atas tindakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder terkait pokok permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan tindakan ISIS terhadap etnis Yazidi merupakan genosida yang diatur dalam Konvensi Genosida 1948 dan Pasal 6 Statuta Roma 1998. Mekanisme penegakan hukum atas tindakan tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan nasional Irak atau Suriah. Namun, Irak dan Suriah tidak memiliki kemampuan dan kemauan melakukan penegakan hukum atas tindakan tersebut. Berdasarkan asas komplementer, dapat dilakukan penegakan hukum melalui Mahkamah Pidana Internasional, namun Irak dan Suriah bukan negara pihak Statuta Roma 1998 sehingga Irak atau Suriah harus menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Berdasarkan Pasal 13 Statuta Roma 1998 Mahkamah Pidana Internasional dapat melaksanakan yurisdiksinya atas kejahatan genosida melalui Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB.

Kata Kunci : ISIS, Yazidi, Genosida.

ABSTRACT

ISIS is terrorist group that threatens world peace. August 2014, ISIS attacked ethnic Yazidis who non-Muslims in Sinjar, Iraq. ISIS carried out torture, murder, sexual violence against Yazidis in Iraq and Syria. This research analysis ISIS' actions against Yazidi was carried out using crime element of genocide and analysis the law enforcement mechanism for ISIS's actions.

This research uses normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. Data collection is done by literature study to obtain secondary data related to the subject matter. This research uses qualitative data analysis methods.

The results show that ISIS' actions against Yazidis constitute genocide as regulated in Genocide Convention 1948 and Article 6 of Rome Statute 1998. Law enforcement mechanisms for these actions can be carried out through Iraqi or Syrian national courts. However, Iraq and Syria don't have ability and willingness to enforce law . Based on complementary principle, law enforcement can be carried out through ICC, but Iraq and Syria aren't parties of Rome Statute 1998, so Iraq or Syria must accept jurisdiction of ICC. Under Article 13 of Rome Statute 1998, ICC may exercise its jurisdiction of the genocide through UN Security Council under Chapter VII of UN Charter.

Keywords: ISIS, Yazidis, Genocide